

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara memiliki peranan penting dalam upaya pemerintah menjalankan roda pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009-2014 terus meningkat. Peningkatan penerimaan negara yang berasal dari pajak ditargetkan terus naik sejalan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun atau hampir 80 persen dari total penerimaan negara. Angka tersebut lebih tinggi Rp 346,3 triliun dari realisasi APBN tahun 2014 sebesar Rp 1.143 triliun. (Sumber <http://www.economy.okezone.com> di akses 23 Maret 2015).

Pada tahun 2009 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 652 triliun dengan realisasi penerimaan pajak Rp 620 triliun. Tahun 2010 pemerintah menargetkan sebesar Rp 743 triliun namun realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 723 triliun. Dan tahun 2011 pemerintah menaikkan target sebesar Rp 879 triliun namun realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 874 triliun. Tahun 2012 pemerintah menargetkan Rp 1.016 triliun namun realisasi penerimaan Rp 981 triliun. Tahun 2013 pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak lebih tinggi yakni sebesar Rp 1.148 triliun namun realisasi penerimaan pajak Rp 1.077 triliun dan belum juga mencapai target. Pada periode 2014 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.246 triliun namun realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.143

triliun masih juga belum cukup untuk memenuhi target. (Sumber: Data Litbang Okezone dalam <http://www.okezone.com>, diakses 23 Maret 2015).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir tidak mencapai target. Di sisi lain pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya melalui kegiatan sensus pajak yang bertujuan agar subjek pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem pemungutan pajak, pemerintah menjalankan *self assessment system* yang bertujuan untuk memberi kewenangan kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri, melaporkan, dan membayar sendiri besarnya pajak yang terhutang, serta yang terbaru pemerintah menggunakan layanan pelaporan secara *online* melalui sistem pengisian elektronik atau *e-filling*.

Sebagaimana dikutip dalam situs www.jawapos.com (2/5/2014) pemerintah telah menjalankan enam strategi untuk mencapai target penerimaan pajak. Pertama, ekstensifikasi atau menjangkau lebih banyak wajib pajak (WP) dari kelompok orang pribadi yang berpendapatan tinggi dan menengah. Kedua, intensifikasi dan ekstensifikasi ke sektor-sektor yang selama ini belum banyak digali potensinya, yakni properti dan usaha kecil menengah (UKM). Ketiga adalah penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Keempat, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi yang terkait dengan perpajakan dari institusi lain. Dan strategi kelima adalah penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak serta keenam penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan

kepastian hukum. Namun realisasi penerimaan pajak di tahun 2014 masih juga belum mencapai target (*shortfall*).

Dalam satu dekade terakhir hanya tiga kali penerimaan pajak mencapai target APBN, yaitu tahun 2004, 2005, dan 2006. Sehingga menjadi penting untuk dipelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dalam upaya untuk mencapai target. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Hal ini karena kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada prosesnya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, Jawara (2014) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel berupa kesadaran wajib pajak, pelayanan *account representative*, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan *account representative*, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kecuali pada variabel tingkat pendidikan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikutnya, Jatmiko (2006), Arum (2012), Yudharista (2014) juga melakukan penelitian yang hampir sama. Jatmiko (2006) meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menggunakan variabel yang berupa sikap wajib pajak yang berupa sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan. Arum (2012) meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, hanya saja objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Cilacap. Yudharista (2014) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan pada KPP Tulungagung yang hasilnya berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Walaupun faktor-faktor yang diungkap penelitian sebelumnya kelihatan dengan jelas dapat dipetakan faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat kepatuhan namun ternyata kepatuhan wajib pajak tidak dapat ditingkatkan dengan mudah. Novitasari (2007) secara khusus melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menggunakan variabel berupa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak berada, hukum pajak dan sikap fiskus. Hasil dari penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh dari variabel-variabel yang digunakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Moh.Edo dkk (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, dan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikutnya, Emalia (2012) menggunakan variabel berupa kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nalendro (2014) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kudus menggunakan variabel pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menemukan bahwa tidak adanya pengaruh

signifikan. Rahmawaty (2014) menggunakan variabel bebas berupa sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kota Malang menunjukkan hasil yang sama bahwa sanksi tidak menunjukkan pengaruh kepatuhan perpajakan. Sumantri dan Astrini (2013) dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh lingkungan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa lingkungan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan-perbedaan hasil penelitian yang masih membutuhkan penelaahan lebih mendalam khususnya bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian di atas membuat peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti memilih kesadaran wajib pajak, lingkungan, sanksi pajak, serta pengetahuan perpajakan sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Objek penelitian ini menekankan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas karena wajib pajak orang pribadi cenderung mengurus sendiri kewajibannya. Pertimbangan berikutnya adalah sampai saat ini penerimaan pajak masih didominasi PPh Badan. Apabila sistem perpajakan didominasi wajib pajak badan maka rentan terhadap kondisi perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memindahkan basis penerimaan pajak dari wajib pajak badan ke wajib pajak orang pribadi atau sektor UMKM. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh

wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan salah satu upayanya.

Adapun alasan menjadikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Pabean Cantikan sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan memiliki tingkat kepatuhan yang cukup rendah di dibandingkan dengan 11 KPP Pratama lainnya di Surabaya. Hal ini tergambar melalui rata-rata persentase selama tiga periode penyampaian SPT yaitu sebesar 67 %. Berikut disajikan tabel 1.1 mengenai kepatuhan SPT Tahunan PPh Tahun 2010-2012 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah Kanwil DJP Jatim I Tahun 2010-2012.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan SPT Tahunan PPh Tahun 2010-2012 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Wilayah Kanwil DJP Jatim I

KPP Pratama Surabaya	Rasio Kepatuhan			Rata-Rata Persentase
	2010	2011	2012	
Rungkut	52,64%	58,57%	117,97%	76,93%
Mulyorejo	53,10%	90,31%	82,50%	75,30%
Genteng	42,20%	67,74%	113,68%	74,54%
Gubeng	61,77%	77,09%	83,65%	74,17%
Sawahan	84,43%	65,10%	62,69%	70,74%
Simokerto	66,20%	65,27%	75,73%	69,07%
Kremlangan	86,91%	52,33%	67,61%	68,95%
Pabean Cantikan	64,25%	59,00%	77,76%	67,00%
Sukomanunggal	60,20%	81,99%	48,66%	63,62%
Tegal Sari	58,35%	55,93%	46,05%	53,44%
Karang Pilang	53,10%	57,76%	46,83%	52,56%
Wonocolo	55,00%	17,00%	64,75%	45,58%

Sumber : Kanwil DJP Jatim I, 2015

Jumlah penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan Tahun 2012-2014 mengalami

penurunan, padahal jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami kenaikan.

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi

Terdaftar S.d. Tahun	Jumlah WP	Lapor SPT Tahunan
2014	12455	4612
2013	11598	5251
2012	10867	5276

Sumber: KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, 2015

Didasari hal tersebut, dalam beberapa tahun terakhir KPP Pratama Pabean Cantikan menunjukkan prosentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dari tahun 2010 sampai tahun 2014 selalu mengalami penurunan. Berikut disajikan tabel 1.3 mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dari tahun 2010-2014.

Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan Tahun 2010-2014

Terdaftar S.d. Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan	Prosentase Kepatuhan
2010	598	247	41%
2011	642	237	37%
2012	672	241	36%
2013	680	236	35%
2014	685	181	26%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, 2015

Selain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, wilayah kerja KPP Surabaya Pabean Cantikan sebagian besar dipadati kondisi wajib pajak yang multikultural dengan beberapa etnis seperti etnis Madura dan Arab yang dikenal sebagai pengusaha atau saudagar serta melakukan pekerjaan bebas dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi pengaruh analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh kesadaran wajib pajak, lingkungan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan?
2. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan?

3. Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan?
2. Untuk menguji pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan?
3. Untuk menguji pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan?
4. Untuk menguji pengaruh perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan?

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi sebagai bahan informasi yang diperlukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Surabaya
2. Bagi praktisi KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dapat memberikan masukan mengenai kebijakan yang bisa diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi penulis sebagai tambahan wawasan serta informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Bagi peneliti sebagai bahan referensi dalam melakukan kajian di bidang yang sama untuk pengembangan teori perpajakan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian diklasifikasikan ke dalam lima bab, yaitu bab I pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan V Simpulan dan Saran.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Penerimaan pajak dari tahun 2010-2015 selalu naik namun mengalami kendala yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak antara lain karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk mengkaji secara intensif faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menguji apakah variabel kesadaran wajib pajak, lingkungan, sanksi, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan konsep dan teori-teori serta argumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Adapun konsep, teori, dan argumentasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dijelaskan antara lain mengenai pengertian pajak penghasilan, pengertian wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, serta konsep, teori, dan argumentasi mengenai variabel yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, lingkungan, sanksi, dan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain mencakup landasan teori, bab ini juga mencakup penelitian sebelumnya, hipotesis dan kerangka berpikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab 3 merupakan bab tentang metode penelitian, dimana peneliti akan menjelaskan mengenai prosedur dan proses yang di lakukan dalam melakukan penelitian. Bab ini diawali dengan menjelaskan pendekatan yang akan dilakukan yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey selanjutnya mengidentifikasi variabel yang di gunakan dalam penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya menjelaskan mengenai sumber

dan jenis data yang digunakan serta penjelasan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Dan bagian terakhir menjelaskan teknis analisis yang akan dilakukan, meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 adalah bab hasil dan pembahasan yang berisi hasil analisis penelitian. Bab ini diawali dengan penjelasan mengenai gambaran umum subjek dan objek penelitian, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dan kemudian menjelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian yang mencakup uji validitas dan realibilitas data, serta uji asumsi klasik. Kemudian bagian selanjutnya berisi analisis model dan pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai hasil analisis penelitian. Analisa dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan bantuan program SPSS 13.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 adalah bab terakhir yaitu bab yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dimana kesimpulan yang di ambil dalam penelitian ini adalah bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Selain kesimpulan, penelitian ini juga disertakan mengenai saran dan keterbatasan penelitian.